PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BKAD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Nomor SOP	11/BKAD-AKLAP/SOP/2025
	Tanggal Pembuatan	01 SEPTEMBER 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Feri Irawan, SE, M.Si Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19751015 199703 1 001
	Judul SOP	Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 10 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4. Kasubbid 5. Staf / Fungsional Umum Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Surat Masuk/Surat Keluar 2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Lembaran Kerja 2. Buku Catatan Keuangan SPJ 3. Komputer, Kalkulator, ATK 4. LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
1. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 2. BPK 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Keuangan	1. LK Audited 2. LRA OPD 3. Persetujuan Bersama 4. Risalah Rapat

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana									Kabid	Kasubbid	Staf	Mutu Baku			Ket.
		Kemendagri	DPRD	Bupati	Sekda	Asisten III	Biro Hukum	Bagian Hukum	BPKAD Provinsi	Kepala BPKAD				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
1	Menerima Surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													Surat Mendagri		Surat Mendagri	SOP alur keluar masuk surat
2	Melaksanakan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													Matriks dan Batang Tubuh Ranperda dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Matriks dan Batang Tubuh Ranperda dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
3	Menyusun Rancangan ancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													Draft Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Draft Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
4	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir													Surat Pengantar dan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Surat Pengantar dan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
5	Mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan ancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
6	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Gubernur Riau melalui BPKAD Provinsi Riau													Dokumen Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Dokumen Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana												Mutu Baku			Ket.
		Kemendagri	DPRD	Bupati	Sekda	Asisten III	Biro Hukum	Bagian Hukum	BPKAD Provinsi	Kepala BPKAD	Kabid	Kasubbid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Mengikuti Rapat Evaluasi Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		SK Hasil Evaluasi Gubernur	
8	Menerima Surat Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													SK Hasil Evaluasi Gubernur Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Draft Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
9	Menerima Surat Pemberian Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir													Draft Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Draft Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
10	Menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													Draft Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Draft Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
11	Menandatangani Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
12	Menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Gubernur Riau melalui BPKAD Provinsi Riau													Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir,

Feri Irawan, SE, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19751015 199703 001